

# PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA **DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

Jalan Manggis No.2 Telp. (0371) 21213 Fax. (0371) 21012 SUMBAWA BESAR

Kode Pos 84317

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA **NOMOR 116 TAHUN 2012** DIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA TENTAKO

#### PEMBERIAN DAATABTONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURNAN ISBAK AL MA'ARB

## PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) nessa swadmus ina am IA (AMS) nauru(ax dapal Ma'arif Sumbawa Besar

#### id pada diktum kesatu kepada sekole KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA,

#### Menimbang

- bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan dan memberikan kesempatan kepada peserta didik lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke pendidikan menengah atas dan melengkapi kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan sebagai bekal keahlian untuk can di Sumbawa Besar menciptakan lapangan kerja bagi peserta didik maka peningkatan pelayanan dan daya tampung Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terus diupayakan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan A.dINAS, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa tentang operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al Ma'arif Sumbawa Besar.

#### Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarla:
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 3. sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Yth. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat d;8002 nurlaT 12 nomoN Yth. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupate
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 12. Yth Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelathan Kabupa Sekolah yang bersangkutan untuk maklum dan seperlu
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru
- 6.. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimna telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa;

## MEMUTUSKAN: WASUTUSEN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) AL MA'ARIF

SUMBAWA BESAR;

KESATU

Memberi Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al Ma'arif Sumbawa Besar;

**KEDUA** 

: Dengan pemberian ijin operasional sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu kepada sekolah

tersebut diberi wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan sesuai dengan peraturan

yang berlaku;

akan lapangan kena bagi peserta didik, maka peningkatan pelayanan dan daya tampang

guessan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa tertang

bahwa dalam rangka pemerataa : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Sumbawa Besar pada tanggal 30 Juli 2012

, RANIO ALASSA terdeserkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas pertu-ditetankan

Drs. H. HASAN BASRI .

#### TEMBUSAN :

- 1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
- Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta; posboli posboli
- 3. Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
- 4. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Depdikbud di Jakarta:
  - Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;

Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daeran

- 6. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;

  - Yth. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram; Yth. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
- 9. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
  - 10. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
  - 11. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar,

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60/U/2002 tentang Pedeman Pendinan Sekolah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagainna telah diubah dengan Keputusan

12. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar,

Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;

13. Sekolah yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya.

ublik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedeman Pelaksansar

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelalaan

Progata Timur